

Artikel Society

by Nanang Wahyudin

Submission date: 10-Oct-2022 08:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1921574705

File name: Artikel_Society_2022.docx (81.3K)

Word count: 7245

Character count: 48293

HABITUASI SUBKULTUR TIONGHOA DI TENGAH DOMINASI MELAYU BANGKA: POLITIK BERBAGI PERAN

Ibrahim Ibrahim^{1*}, Arief Hidayat², Herza Herza³

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

²Jurusan Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: iim_babel@yahoo.com

Intisari

Etnis Tionghoa adalah etnis yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Pulau Bangka. Hubungan harmonis Etnis Tionghoa dengan penduduk lokal menunjukkan adanya proses habituasi yang berjalan dengan baik sehingga keberadaan mereka diterima sebagai realitas sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengumpulkan data dari proses wawancara dan observasi di kabupaten/kota dalam Pulau Bangka. Studi ini menemukan bahwa keberadaan Etnis Tionghoa telah diproses melalui penguatan 4 modal utama Etnis Tionghoa, meminjam pandangan Boerdiau, adalah modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Penguasaan modal yang baik telah mendorong politik berbagi peran yang baik karena penguasaan modal dilakukan secara transformatif. Tidak mengherankan jika subkultur minoritas Tionghoa, meski dalam banyak hal terasa dominatif, tetap dapat diterima sebagai sebuah realitas sosial yang membentuk harmoni antarkultur di pulau ini.

Kata Kunci: *Habituasi, Modal, Tionghoa, Melayu, Bangka*

Abstract

Ethnic Chinese is an ethnic group that has long been part of the people of Bangka Island. The harmonious relationship between the ethnic Chinese and the indigenous population shows that there is a habituation process that is going well so that their existence is accepted as a social reality. By using a qualitative descriptive method, this study collected data from the interview and observation in regency/city in Bangka Island. This study finds that the existence of the Chinese Ethnic has been carried forward through the 4 main capitals of the Chinese Ethnic, using Boerdiau's view, namely economic capital, social capital, cultural capital, and symbolic capital. Good capital control has encouraged good role sharing politics because capital control is carried out in a transformative manner. It is not surprising that the Chinese minority subculture, although in many ways it feels dominant, can still be accepted as a social reality that is harmonious between cultures in this island.

Keywords: *Habituasi, Capital, Chinese, Malay, Bangka*

1. Latar Belakang

Etnis Tionghoa telah dikenal lama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Bangka. Dalam sejarahnya, Etnis Tionghoa Pulau Bangka sudah lebih dulu ada sebelum adanya Indonesia. Riwayat kedatangan etnis Tionghoa sejalan dengan adanya migrasi akibat pertambangan timah. Timah sebagai komoditas yang penting selain rempah, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penguasa yang ada di Malaka dan juga Kesultanan Palembang (Heidues, 2008; Darwance, dkk, 2017; Erman, 2007; 2008; 2009). Mereka yang datang umumnya merupakan pekerja yang terampil dalam mengolah logam. Tenaga kerja dari Guangdong Tiongkok dianggap lebih baik dalam mengolah dan menambang timah yang mulai marak menjadi komoditas setidaknya pada abad ke-17 (Heidues, 1992, 2008). Tidak heran jika produksi timah yang banyak di masa kolonial dari Pulau Bangka karena eksploitasinya yang melibatkan penambang dari daratan Tiongkok (Erman, 2010).

Etnis Tionghoa adalah etnis minoritas di Pulau Bangka sekalipun banyak sumber mengatakan bahwa mereka adalah etnis yang telah lama mendiami daerah kepulauan ini. Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa hampir sama dengan sejarah kedatangan masyarakat Melayu dari sekitar Pulau Bangka, antara lain dari daratan Palembang, Sumatera, Johor, dan Kepulauan Riau. Secara umum, Etnis Tionghoa mendiami daerah-daerah bandar sejak dulu, antara lain Pangkal Pinang, Mentok, Toboali, Belinyu, Sungaliat, serta Tanjung Pandan dan Manggar di Belitung. Boleh jadi sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Pulau Bangka adalah merupakan sejarah awal kedatangan Tionghoa di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Etnis Tionghoa telah lama menjalin hubungan dengan pulau-pulau di Nusantara, bahkan sejak sebelum dan selama masa kolonialisme (Han, 2017; Suharnomo, 2017).

Keberadaan Etnis Tionghoa di Pulau Bangka yang telah berlangsung berabad-abad itu khususnya di Pangkalpinang, dibuktikan dengan adanya kompleks perkuburan Tionghoa yang diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Komplek pemakaman dengan luas kurang lebih 20 hektar itu menyiratkan suatu simbol dominasi subkultur Tionghoa yang minoritas. Padahal, dari segi perbandingan lahan pemakaman yang dimiliki oleh Melayu, hanya seluas 3-5 hektar saja. Luasnya area pemakaman menyiratkan kekuasaan yang kuat yang dimiliki oleh tokoh Tionghoa di era kolonial dan kemerdekaan dengan menyiratkan simbol keluasan penguasaan tanah. Tionghoa menjadi subkultur yang unik di tengah kebudayaan dominan Melayu. Subkultur sendiri menurut Zaenudin (2016) dipahami sebagai sebuah kelompok yang membentuk identitasnya sendiri di tengah eksistensi yang minor dari sebuah kebudayaan besar.

Posisi dominatif yang lainnya yang ada di Pulau Bangka adalah penguasaan pusat kegiatan ekonomi yang umumnya menjadi dominasi Tionghoa. Perusahaan dan perdagangan serta kegiatan ekonomi lainnya, bahkan jejaring bandar timah umumnya dipegang orang Tionghoa (Ibrahim, 2013). Kondisi ini menyiratkan satu hal bahwa Tionghoa memiliki relasi dominatif dalam suatu bidang dibandingkan dengan Etnis Melayu yang secara kuantitas lebih mayoritas. Namun, dominasi etnis Tionghoa terhadap Melayu yang ada di Bangka tidak mengemuka sebagai sesuatu yang konfrontatif. Menariknya, pada saat terjadinya kekerasan di Jakarta dan kota besar lainnya tahun 1998 dengan banyak korban dari etnis Tionghoa, dan peristiwa itu sama sekali tidak terjadi di Pulau Bangka (Akbar, 2016). Tidak ada satu orang pun Tionghoa yang diganggu dan tidak ada satu toko pun atau tempat usaha yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa di rusak bahkan dibakar massa, meskipun ada demonstrasi di Muntok, Tanjungpandan dan Pangkalpinang yang juga menghendaki agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara administratif merupakan provinsi muda yang dibentuk pada medio November tahun 2001. Sebelumnya Bangka Belitung merupakan satu kesatuan provinsi secara administratif dengan Sumatera Selatan. Pemisahan kewilayahan ini sendiri berlangsung dengan mekarnya tuntutan otonomi daerah yang bergulir pasa reformasi. Dalam proses menjadi provinsi yang mandiri itu, Bangka Belitung semakin bertumbuh dengan segala muti etnis, kultur, dan beraneka ragam kekayaan lainnya yang berlangsung secara simultan. Harmonisnya perikehidupan berbagai etnis yang ada di Pulau Bangka belum mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa semua itu bisa terjadi, secara lebih jauh bagaimana masa depan harmonisasi itu di tengah kontestasi peran yang saling mendominasi, khususnya yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa di Pulau Bangka. Penjelasan sementara hadir secara historis dengan adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai populasi yang terjajah (Sya, dkk., 2019), namun ikatan ini dibantah dengan adanya perlakuan kelas dua bagi etnis Tionghoa di daerah lain yang ada di Jawa dan pulau Sumatera daratan.

Tulisan ini mencoba membedah bagaimana modal yang dimiliki oleh etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka mampu menjadi sandaran dalam menopang hadirnya eksistensi harmonisasi antara Tionghoa dan pribumi yang ada di kepulauan ini. Terminologi penduduk lokal atau Pribumi yang secara bergantian akan digunakan dalam tulisan ini merujuk pada

penduduk dengan riwayat historis pada akar sejarah etnisitas nusantara, bukan merujuk pada konteks diferensiasi *othering*. Tulisan ini tentu juga menepungkan bagaimana relasi kontestasi dominasi antar etnis terjadi melalui pendekatan modal yang disampaikan oleh Bourdieu (1990). Bourdieu sendiri sebenarnya membuka tradisi baru dalam dinamika sosial yang absurd antara individu dan masyarakat (Bourdieu, 1990). Untuk mengatasi pertentangan ini, Bourdieu memilih menggunakan cara berfikir rasional (David Swartz, 1997) bahwa struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan perilaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal-balik atau dualitas (Giddens, 1997, Priyono, 2002). Keduanya tidak saling menafikkan, tetapi terpaut dalam sebuah praktik.

Bourdieu sendiri menjelaskan bahwa habitus merupakan dasar terbentuknya ranah, sementara di lain pihak ranah menjadi fokus bagi kinerja habitus. Ranah merupakan arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Istilah modal digunakan oleh Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat (Fashri, 2007:97). Dalam konsep modal Bourdieu tidaknya ada 4 (empat) klasifikasi modal, diantaranya: Modal Ekonomi, yang merujuk pada alat produksi, materi dan yang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Modal Sosial, merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kuasa; Modal Budaya, yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, dan; Modal Simbolik yang mencakup segala bentuk prestise, status sosial, otoritas dan legitimasi (Fashri, 2007). Dengan pendekatan modal ini diharapkan muncul perspektif baru bahwa dalam mendukung hadirnya harmonisasi di tengah kontestasi dominasi, diperlukan banyak elemen yang mengeratkan dan mengurangi berbagai elemen pembeda sehingga mampu tercipta bangunan kokoh kekeluargaan yang ada selama ini di Pulau Bangka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bercorak eksploratif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dan untuk memproduksi generalisasi yang diturunkan dari proses induktif tentang grup, proses, aktivitas, atau situasi yang dipelajari (Given, 2008; Umar, 2011; Bakhri & Hanubun, 2019). Dalam penelitian ini, yang digambarkan secara eksploratif dengan logika generalisasi tersebut adalah bagaimana proses terjadinya habituasi subkultur Tionghoa di tengah masyarakat mayoritas Melayu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah wawancara dan observasi, dengan subjek penelitian adalah orang-orang Etnis Tionghoa serta orang Pribumi di Pulau Bangka. Data yang terkumpul akan dianalisis sesuai dengan pendekatan kualitatif, yang mana tiga alur kegiatan analisis akan dilakukan secara bersamaan dan fleksibel, yakni reduksi data, penyajian data, analisis, penarikan kesimpulan, dan triangulasi (Cresswell, 2017; Miles dan Huberman, 2014). Data dikumpulkan dari November 2021 sampai dengan Juni 2022.

3. Identitas Tionghoa dalam Dominasi Melayu Bangka

Identitas merupakan salah satu penanda yang dimiliki oleh segolongan komunitas dengan memiliki latar belakang, budaya atau ciri yang sama. Penanda identitas ini muncul sebagai satu kesatuan kolektif untuk mencerminkan adanya kesamaan (Ibrahim, 2013). Bagi masyarakat Melayu penanda utamanya mereka berasal dari keturunan dan nenek moyang yang sama, misalnya dari Sumatera dan Malaka.

Meskipun etnis Tionghoa yang ada di Bangka merupakan minoritas, namun mereka tidak mendapatkan represi atau perlakuan yang diskriminatif. Setidaknya terbukti dengan hadirnya nuansa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi itu, setidaknya muncul dari komitmen kuat etnis yang dianggap mayoritas, yaitu Etnis Melayu yang memberikan ruang yang maksimal dan tidak ada batasan dalam berbagai hal. Selain itu, Etnis Tionghoa yang merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang datang ke Bangka sebagai pekerja tambang, menganggap Pulau Bangka tanah air keduanya. Mereka yang saat ini diperkirakan sebagai generasi ketiga dan keempat telah menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka.

Secara eksplisit mayoritas informan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah terpikirkan untuk kembali ke negeri Republik Rakyat Cina (RRC) sana. Bahkan rata-rata dari mereka yang hidup sekarang, sudah tidak tahu lagi mengenai keluarga dari kakek atau orang tua mereka dari tanah leluhur, Tiongkok tersebut. Ditambah lagi faktanya bahwa etnis Tionghoa di Bangka sudah banyak yang melangsungkan pernikahan dengan Etnis Melayu. Pernikahan ini membuat rasa nasionalisme lokal mereka menjadi semakin kuat, dan tentunya pernikahan yang kemudian melahirkan keturunan, secara alami akan memunculkan anggapan dari orang Melayu atau pribumi bahwa mereka adalah “orang kita”.

Seperti dituturkan oleh Edi Santoso Ngui bernama asli Fu Ciong, 50 Tahun, warga Dusun Songhin, Desa Jurung, Kabupaten Bangka mereka bahkan tidak pernah berpikir lagi untuk kembali ke tanah leluhur mereka, yakni Tiongkok. Bahkan untuk liburan pun menurut mereka tidak pernah terbersit. Bagi mereka, menjadi Indonesia seutuhnya adalah sebuah keharusan, bahkan anak-anak mereka tidak lagi terobsesi belajar Bahasa Mandari sebagai bahasa leluhur mereka.

Adapun berdasarkan sejarahnya, kedatangan awal para pekerja timah Guandong Cina ke tanah Bangka, tidaklah mengikutsertakan istri ataupun keluarga perempuan, melainkan hanya laki-laki yang datang. Para laki-laki pekerja ini lalu menikah dengan perempuan Melayu dan seterusnya. Silsilah pernikahan ini kemudian memunculkan istilah kekerabatan baru yang lebih erat antara Melayu-Tionghoa. Peleburan identitas ini muncul sebagai konsekuensi terputusnya hubungan dengan Cina daratan. Praktis mereka yang menikah dengan Melayu, biasanya sudah tidak lagi melestarikan tradisi leluhurnya dan terbawa pada tradisi Melayu. Sesuatu yang paling terlihat misalnya adalah lunturnya Bahasa Mandarin, perpindahan agama leluhur dan juga tidak adanya tradisi sembahyang kubur bagi mereka yang sudah melebur bersama Melayu.

Afing, salah satu informan dari Desa Pelangas, Bangka Barat mengatakan bahwa ia sudah seperti masyarakat lokal kebanyakan. Ia memang tinggal di daerah yang banyak orang Melayu, berteman dengan mereka, pernikahan antar etnis, bahkan sehari-hari Afing mengatakan ia berbahasa Pelangas. *“Saya hobi berburu burung dan tupai dengan teman orang Melayu, otomatis bahasa dan karakter saya seperti mereka”*, kata Afing dalam kesempatan wawancara.

Dari segi kepercayaan juga terlihat bahwa Pulau Bangka terdiri atas banyak sekali agama dan kepercayaan. 6 agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara ada di provinsi ini. Konghucu dan Budha merupakan agama awal para migran Etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Mereka kemudian dengan pemahamannya masing-masing menikah dengan Melayu yang cenderung Islam atau pendatang dari suku lain yang Kristen atau Katolik. Perpindahan agama di Pulau Bangka tidak masuk dalam isu yang problematik. Namun, sesungguhnya di balik apa yang ditampilkan itu, ada kontestasi identitas yang terasa, di mana Etnis Tionghoa belajar dari kejadian di daerah lain yang justru banyak meminggirkan dan tidak mengakui Tionghoa sebagai warga negara yang juga memiliki hak sesuai dengan janji negara dalam undang-undang. Di banyak tempat terjadi kerusuhan dengan latar belakang perbedaan agama dan etnis. Tidak jarang mereka yang berasal dari etnis Tionghoa secara diskriminatif

bahkan represif mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi karena tidak adanya pengakuan dari negara.

Tabel 1. Statistik Pemeluk agama di Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Agama							Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Kepercayaan	
Bangka	270.846	7.485	3.650	29	26.252	7.031	1.759	317.052
Belitung	155.257	2.727	1.142	759	9.014	147	7	169.053
Bangka Selatan	170.721	1.187	723	231	1.496	2.299	1	176.658
Bangka Tengah	159.581	4.713	4.664	41	6.462	6.814	11	182.285
Bangka Barat	181.378	2.848	953	27	8.254	3.597	9	197.066
Belitung Timur	118.554	1.569	405	3	3.380	163	5	124.079
Pangkalpinang	177.317	8.179	7.164	64	12.860	7.966	23	213.573
Total	1.233.654	28.708	18.701	1.154	67.718	28.017	1.815	1.379.767

6 sumber:

https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/Databaru/191120_15742475820Data_Penduduk_2018.pdf

7 Secara kultural identitas yang dimiliki Tionghoa yang ada di Pulau Bangka dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan utama, yaitu, *Totok* dan Peranakan (Ibrahim, 2013; Nugroho, 2013; Reid, 2009). *Totok* merupakan Tionghoa yang memiliki hubungan langsung dengan leluhurnya di Tiongkok atau biasa disebut generasi Tionghoa awal, sedangkan Peranakan dilekatkan bagi Tionghoa yang sudah bercampur dengan etnis lain, atau meninggalkan budaya leluhurnya. Tionghoa *Totok* sangat memegang teguh tradisi dengan tetap berlaku melestarikan tradisi leluhurnya, misalnya dengan tetap berbahasa Mandarin, melestarikan Sembayang Hio, ziarah kubur leluhur, sampai pada perayaan adat dan budaya Tionghoa.

Adapun Tionghoa Peranakan, lebih merupakan mereka yang mampu berinteraksi bahkan menjalin hubungan kekeluargaan dengan etnis lain di luar Tionghoa. Di antara mereka bahkan sudah menikah dengan etnis lain yang ada di Pulau Bangka. Umumnya mereka mulai melepas identitas Tionghoanya, bahkan diantaranya tidak menguasai bahasa leluhurnya Mandarin dan berpindah kepercayaan tidak lagi beragama Konghucu.

Etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka memang awalnya merupakan penambang Timah. Magnet timah inilah yang mendorong mereka datang. Selanjutnya, dengan semakin terbukanya lapangan usaha lain dan kebijakan negara yang semakin akomodatif terhadap Etnis Tionghoa, mereka umumnya berusaha dengan lebih banyak masuk dalam dunia usaha. Dunia politik bagi Etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka pada awalnya merupakan bidang yang dijauhi. Bahkan bagi sebagian orang Tionghoa memori adanya kekerasan politik yang dirasakannya pada saat Orde Baru masih membekas (Aryodiguno, 2018; Brahma, 2018; Cribb & Copel, 2009). Pada saat musim Pemilu baik nasional maupun lokal, tingkat partisipasinya cenderung minim, khususnya bagi mereka Etnis Tionghoa yang ada di kampung-kampung. Namun, masa itu berubah setelah reformasi (Turner, 2003; Turner & Allen, 2007). Secara statistik Etnis Tionghoa kini di Bangka dan Belitung banyak yang menduduki jabatan strategis, baik sebagai kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan DPD/DPR RI.

Keterbukaan lapangan politik bagi Etnis Tionghoa ini tidak lepas dari minimnya sentimen etnis dalam Pemilu atau Pilkada. Sebenarnya dari statistik pemilih, pemilih yang

berasal dari Melayu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Etnis Tionghoa itu sendiri. Dari segi modal politik Tionghoa Bangka Belitung sudah dianggap sangat mapan. Lapangan masyarakat Tionghoa yang semakin terbuka ini, membuat Etnis Tionghoa semakin terakomodir dan diakui dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan politik yang biasanya didominasi Melayu, saat ini sudah banyak politisi yang berasal dari Tionghoa. Menariknya, mereka yang duduk dalam jabatan eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah tidak mengafirmasi kepentingan khusus Etnis Tionghoa, namun bersikap layaknya wakil atau pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat Bangka Belitung.

Tabel 2. Beberapa Tokoh Tionghoa Bangka Belitung dan Perannya

Nama	Jabatan
Lim Tau Kian	Sesepuh Tionghoa
Toni Wen	Sesepuh Tionghoa
Amung Tjandra	Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi
Basuki Tjahaya Purnama	Mantan Bupati Belitung Timur
Basuri Tjahaya Purnama	Mantan Bupati Belitung Timur
Rudianto Tjen	Anggota DPR RI
Hidayat Arsani	Mantan Wakil Gubernur
Eko Wijaya	Anggota DPR RI 2014-2019
Bambang Patijaya	Anggota DPR RI Kep Babel 2019-2024
Bong Ming Ming	Wakil Bupati Bangka Barat
Me Hoa	Ketua DPRD Bangka Tengah
Bahar Buasan	Anggota DPD RI 2014-2019
Alex Fransiskus	Anggota DPD RI 2020-2024
Isyak Meirobi	Wakil Bupati Belitung 2018-2023

Melihat komposisi beberapa tokoh dan pejabat yang berasal dari Etnis Tionghoa yang ada tersebut, Etnis Tionghoa sudah banyak menganggap bahwa Pulau Bangka Belitung merupakan rumah keduanya. Rumah pertamanya adalah asal usul leluhurnya. Namun, dengan adanya penerimaan yang baik dari Etnis Melayu, Tionghoa Bangka Belitung semakin yakin bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal lapangan politik dan sosial yang ada di Bangka Belitung yang menimpa.

Salah satu bentuk penyesuaian Etnis Tionghoa adalah dengan melakukan perkawinan eksogami antara Tionghoa dengan penduduk pribumi. Hasil observasi menunjukkan bahwa tempat tinggal yang dikelilingi atau bahkan satu kampung dengan orang Melayu turut menentukan terjadinya pernikahan eksogami antara Etnis Tionghoa dengan Etnis Melayu. Ini berlaku dalam konteks di perkampungan yang tidak serta merta berlaku dalam kehidupan dalam konteks perkotaan (Ibrahim, dkk, 2019; 2020). Contoh perkampungan yang memperlihatkan banyak Etnis Tionghoa yang menikah dengan orang Melayu adalah Kawasan Sungaiselan, Lampur, dan Trubus yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah, Kawasan Pelangas, Dusun Suntai, dan Parit Tiga yang berada di Kabupaten Bangka Barat, Desa Lumut dan Dusun Cengel yang berada di Kabupaten Bangka. Perkampungan yang disebutkan di atas adalah kampung-kampung yang secara geografis dan lingkungan sosial dikelilingi oleh perkampungan yang mayoritas penduduknya adalah Melayu.

Beberapa informan mengatakan bahwa lingkungan sosial mereka yang katakanlah didominasi oleh orang-orang Melayu menjadi kondisi yang tidak terhindarkan menjadi sebab mereka sering bergaul dan melangsungkan interaksi sosial dengan orang Melayu. Untuk beberapa orang, nyatanya pergaulan dan interaksi ini menjadi awal sebuah terciptanya hubungan yang intensif, salah satu implikasi sosialnya adalah mereka menjadi yakin satu sama

lain untuk menikah. Perbedaan etnis, agama, budaya dan sebagainya, yang semula diasumsikan bisa mengahalangi, nyatanya menjadi bisa ternegosiasi. Awak, salah satu informan yang bersuamikan orang Melayu Sungai Selan mengatakan *“kami tinggal di dengan mereka yang bukan Tionghoa, tak heran membuat kami dekat dan kemudian menikah”*.

Ungkapan lain yang mengarah kepada bagaimana kondisi lingkungan dan pergaulan yang erat dengan orang Melayu membuat terjadinya pernikahan eksogami, datang dari Ayang, warga Etnis Tionghoa yang tinggal di Sungaiselan. Ayang mengatakan bahwa ia terbiasa berteman dengan orang Melayu dan menganggap sama saja. Dalam berteman, mereka tidak saling memposisikan berbeda sehingga menikah adalah yang sangat mungkin.

Selama proses bergaul dan kemudian memutuskan untuk menikah ini tidak selalu keluarga pasangan eksogami ini, khususnya dari keluarga Tionghoa, memilih langsung mendukung hubungan keduanya. Seperti halnya dalam kasus Ayang, beliau bahkan sempat kabur dari rumah karena tidak mendapat dukungan dari keluarga, hingga pada akhirnya orang tua dan saudara-saudaranya bisa dikatakan mengalah, dan memilih untuk berdamai dengan pilihan Ayang.

Ayang juga secara eksplisit mengungkapkan bahwa bagi dia dan suaminya, perbedaan etnis tidak menjadi masalah untuk memutuskan menikah saat mereka menyadari bahwa mereka berdua sudah nyaman, komunikasinya interaktif, saling menyayangi, dan mencintai. Baginya, mereka berhak bersama ketika memang saling cinta. Pernikahan mereka pun tanpa syarat harus salah satu di antara keduanya pindah agama. Terbukti dari ketika peneliti wawancara, Ayang tetap beragama Konghucu sampai suaminya yang *notabene* beragama Islam meninggal dunia.

Meski demikian, memang nampak ada sedikit perbedaan antara eksogami yang umum dijumpai di perkampungan, kondisi di perkotaan relatif jarang terjadi. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh proses asimiliasi masyarakat di perkampungan lebih mudah terjadi ketimbang di daerah perkotaan. Terjadinya distingsi yang demikian di tengah kondisi suasana lingkungan tempat tinggal yang sama adalah karena perbedaan karakteristik sosial antara warga Tionghoa yang hidup di kota dan hidup di kampung. Mereka yang hidup di kota cenderung memiliki karakteristik eksklusif dalam pergaulan sehingga yang terjadi adalah pertemanan, interaksi, dan pergaulan sebatas dalam lingkup sesama etnis. Studi yang dilakukan oleh Karmela dan Pamungkas (2017) di Kota Jambi misalnya, juga menunjukkan hal serupa seperti yang terjadi pada masyarakat Tionghoa yang hidup di kota-kota yang ada di Bangka.

4. Dominasi Modal Pembentuk Habitus

Etnisitas sering dijadikan sebagai alat politik adu domba baik demi kepentingan politik maupun ekonomi. Ritaudin (2017) berargumentasi bahwa salah satu fenomena yang menarik dewasa ini adalah masuknya isu-isu etnisitas dan agama khususnya dalam ranah politik. Isu ini rentan mencederai demokrasi di Indonesia dan memicu kemburuan dan konflik dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Di samping itu, politik etnisitas sebenarnya cenderung merupakan kreasi negara dalam melakukan pabelan pada warganya (Haboddin, 2012). Salim dalam Zein (2000) juga mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sejarahnya, persoalan etnisitas sudah berlangsung sejak era kolonial, di mana pada saat itu Belanda menetapkan orang Tionghoa sebagai kelas dua setelah orang Belanda dan Eropa. Sementara itu, penduduk pribumi ditempatkan menjadi kelas tiga. Akibatnya stereotip setelah Indonesia merdeka melekat pada penduduk Tionghoa sebagai kepanjangan tangan dari penjajah dan sering menjadi alasan untuk menumpahkan kebencian pada mereka.

Di Pulau Bangka, keharmonisan itu mampu diperlihatkan oleh mereka yang ada dalam lingkaran multi etnis. Harmonis di sini diartikan sebagai kondisi di mana antarsatu individu dengan individu yang lain saling se-ia sekata, atau dapat dikatakan perbedaan antara individu sudah terkikis oleh sikap tenggang rasa dan toleransi yang terjalin baik (Fernando, dkk., 2019). Etnis Melayu dan Tionghoa merupakan penduduk yang jumlahnya besar di Bangka Belitung.

Data statistik menunjukkan bahwa komposisi Melayu dan Tionghoa mencapai 69 persen dan 11 persen (Kavin, 2016). Keakraban antara etnis Tionghoa dan Melayu tampak pada pakaian pengantin Melayu yang didominasi oleh warna merah, sebagai simbol warna keberuntungan bagi etnis Tionghoa. Selain itu, di Bangka banyak perempuan Tionghoa yang mengenakan pakaian kain dan kebaya yang merupakan tradisi Melayu. Di bidang kuliner juga membuktikan adanya keakraban antara kedua etnis ini (Theo & Lie, 2014). Martabak Manis atau terang bulan atau *Hok Lopan* merupakan salah satu jenis kue warisan yang menampilkan jejak budaya Tionghoa yang pada perkembangannya berkembang seiring dengan proses akulturasi. Kue *Hok Lopan* ini atau martabak ini merupakan kue yang paling dinikmati oleh seluruh warga yang ada di Kepulauan Bangka Belitung (Setiati, 2008). Keakraban dari sisi interaksi sosial antara dua etnis ini terkonfirmasi juga dengan adanya realitas bahwa setiap hari raya mereka akan saling berkunjung. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu Kepala Dusun di Desa Pelangas, Akhiong (40 Tahun) bahwa pada hari raya masing-masing, mereka akan saling mengunjungi sehingga memang mereka akan saling bersilaturahmi bersilangan identitas.

Perbedaan yang ada ini sudah disadari dengan baik oleh masyarakat Bangka sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dinafikan. Pengakuan kesamaan ini menegaskan adanya simbolisasi berbeda-beda tetapi tetap satu (Marta, 2018). Hal ini merupakan asumsi dasar yang melandasi paham multikulturalisme. Hal yang menarik lagi, yaitu jarang sekali ditemukan konflik antara Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus kerusuhan yang ada di Jakarta dan kota lainnya di Indonesia di mana penduduk etnis Tionghoa di Bangka benar-benar terlindungi (Permana, 2002). Bahkan dalam literatur dan pemberitaan tidak pernah ada kerusuhan rasialis yang ada di Bangka Belitung yang menimpa Etnis Tionghoa (Theo & Lie, 2014). Johan Murod, tokoh Melayu Bangka mengungkapkan bahwa Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka sama-sama melawan penjajah Belanda karena mereka sama-sama sebagai korban jajahan yang menderita pada saat itu (Wawancara Murod, 29 November 2021). Tidak mengherankan bahwa ada semboyan *Hakka Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* yang berarti orang Tionghoa dan Melayu itu sama dan setara.

Kajian yang dilakukan oleh Idi (2012) berargumentasi bahwa hubungan antar etnis yang harmonis dapat terjadi tanpa adanya "rekayasa sosial" sistematis dan memberikan satu pelajaran penting dengan adanya pembagian struktur sosial, politik, agama dan ekonomi yang adil dan setara. Sementara itu Pageh (2018) mengkaji mengenai pemahaman kearifan sistem keagamaan lokal dalam mengintegrasikan keberagaman di Bali. Harmonisasi menurutnya merupakan dasar paripurna akan implementasi nilai agama yang kuat, khususnya Hindu yang ada di sana.

Penulis berasumsi bahwa modal sebagai kekuatan dan menunjukkan bahwa masyarakat yang harmonis sejatinya memiliki kontestasi saling mempengaruhi dan menguasai dalam ritme yang dinamis. Hanya saja dengan pengelolaan yang cerdas, kontestasi itu tidak berada dalam ranah diametral yang memunculkan konflik. Dengan menggali mengenai modal budaya dan sosial terlihat bahwa Etnis Tionghoa mampu mendayung di antara kesempatan yang ada. Penerimaan oleh Melayu sebagai etnis paling besar menandakan lincahnya masyarakat Tionghoa menerapkan strategi akulturasi dalam damai dan harmoni.

Dari tabel 1 yang menampilkan peran tokoh Tionghoa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya nampak bahwa kuasa dominasi itu hadir dan dimiliki oleh etnis Tionghoa. Beberapa tokoh Tionghoa yang memegang jabatan publik dari kalangan politisi baik sebagai anggota dewan maupun sebagai kepala daerah menunjukkan bahwa etnis Tionghoa luwes dalam memainkan perannya dalam masyarakat. Sisi minoritas sebagai kelemahan Tionghoa di Bangka mampu memutar keadaan sebagai titik balik.

Harmonisasi antara Melayu dan Tionghoa mampu menarik jejaring sosial, politik dan ekonomi Tionghoa masuk dalam sistem politik yang mempengaruhi banyak kebijakan khususnya yang berorientasi pada adanya kelas sosial dalam masyarakat. Hadirnya tokoh

Tionghoa dalam memegang jabatan politik mampu mempengaruhi bagaimana Tionghoa berperan dalam masyarakat di tengah kuatnya Melayu secara kuantitas. Secara Modal, Tionghoa Bangka memegang empat sekaligus modal yang disampaikan oleh Buordieu, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Hadirnya keempat modal itu memungkinkan mereka bergerak secara dinamis meskipun dalam kondisi minoritas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, kepastian dan kesetaraan kedudukan dalam hukum pada semua warganegara tanpa adanya diskriminasi etnis. Masyarakat Tionghoa di Pulau Bangka sudah sangat leluasa melakukan berbagai aktivitas bahkan sebelum adanya undang-undang ini. Namun, secara praktis undang-undang ini memberi legitimasi politik lebih kuat bagi Etnis Tionghoa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat terfasilitasi sebagai warga negara, misalnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir, urusan perkawinan resmi negara, dan juga urusan lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, tata usaha bisnis, dan sebagainya. Masyarakat Tionghoa juga telah secara resmi memeluk berbagai agama yang sudah diakui negara, yang ada di Kepulauan Bangka Belitung seperti Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu dan sebagainya.

Etnis Tionghoa umumnya beragama Budha dan Konghucu. Ekspresi kebebasan beragama mereka khususnya lahir ketika masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Pada masa itu, umat Budha dan Konghucu yang umumnya Etnis Tionghoa mampu mengekspresikan kepercayaan dan ibadahnya dalam bentuk pesta ritual seperti *Cheng Beng* atau sembahyang kubur dan juga perayaan tahun baru Cina (Imlek) setiap tahun dengan bebas. Di Sungailiat, Bangka sebagai ekspresi adanya percampuran budaya Tionghoa dan Melayu pemerintah daerah setempat bahkan memberi nama jalan dituliskan dalam tiga bahasa, Indonesia, Arab, dan Mandarin. Kebijakan ini memberikan pesan kuat bahwa daerah itu dihuni oleh berbagai suku agama yang semuanya memiliki posisi warga negara yang setara.

Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan oleh peneliti, interaksi yang ada khususnya antara Melayu dan Tionghoa adalah bidang perdagangan. Di Pasar mereka saling berinteraksi baik sebagai pedagang-pedagang, maupun sebagai pembeli dan pedagang. Orang Tionghoa umumnya berjualan hasil bumi berupa sayur-mayur, peralatan dapur, dan juga rempah-rempah. Sedangkan Melayu umumnya berjualan ikan, sandang dan juga pelaku usaha kecil lainnya. Meskipun jika peneliti melihat lebih jauh, banyak juga Etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai petani, berkebun, peternakan, buruh dan juga nelayan. Mereka melakukan interaksi sosial melalui perdagangan itu dan merupakan tempat terbuka untuk berinteraksi. Sesekali orang Tionghoa akan menggunakan Bahasa Hakka dalam melayani pembeli sesama Tionghoa dan akan berganti menjadi dialek Melayu jika berbicara dengan orang Melayu. Setidaknya terdapat dua jenis pasar yang ada di Bangka, yaitu pasar terbuka di mana etnis Melayu, Tionghoa dan etnis lainnya berinteraksi dalam transaksi jual beli. Pasar yang kedua adalah pasar tertutup atau pasar *kaget*. Komoditas yang dijual di pasar ini cenderung lebih khas khusus bagi Tionghoa (non halal), misalnya: daging babi, cumasi, dodol cina, mie *tek fu* dan sebagainya.

Selain itu, ada juga orang Tionghoa yang menjadi abdi negara sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan menjadi Kepala Dinas. Adanya Etnis Tionghoa yang menjadi PNS di lingkungan pemerintah Daerah di Pulau Bangka menunjukkan tidak adanya diskriminasi etnis dalam perekrutan pegawai. Adanya kemitraan antara Melayu dan Tionghoa di bidang ekonomi terlihat pula dengan adanya kerjasama usaha. Etnis Tionghoa yang memiliki modal finansial bermitra dengan Melayu yang memasok bahan baku atau tenaga kerja. Banyak orang Melayu yang bekerja pada orang Tionghoa sebagai karyawan atau buruh bangunan. Selain di bidang perdagangan itu, interaksi juga terjadi di bidang pertambangan tradisional yang disebut sebagai

Tambang Inkonvensional (TI). TI merupakan tambang rakyat yang digerakkan oleh individu, umumnya mereka menambang secara ilegal dan bahkan menambang di daerah kawasan dan area eks Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah.

Seperti diketahui bahwa orang Tionghoa yang datang ke Bangka umumnya dulu bekerja sebagai penambang timah. Saat ini biasanya orang Tionghoa menyediakan sarana dan prasarana pertambangan TI itu, sedangkan orang Melayu sebagai pekerjanya. Hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung ada TI dan areanya semakin luas bahkan sampai pada tambang laut. Sentra penambangan Timah terbesar ada di wilayah **Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan** dan **Belitung Timur**. Sedangkan untuk wilayah Pangkalpinang dan Belitung, Pemerintah Daerah masing-masing dengan tegas menolak tambang timah dan kerap kali melakukan razia sehingga banyak penambang yang lari ke kabupaten lain yang lebih longgar pengawasan aparatusnya. Banyak toko-toko Tionghoa di Sungailiat dan juga Pangkalpinang yang menyediakan alat-alat pertambangan timah ini. Meskipun mayoritas orang Tionghoa yang berdagang, namun tidak ada sentimen ras, yang membuat persoalan dalam transaksi jual-beli. Orang Melayu dan Tionghoa saling beraktivitas jual-beli sebagai salah satu bentuk interaksi simbolik sebagai modal sosial hadirnya kesetaraan dalam pergaulan bermasyarakat.

Dalam bidang politik, memang mayoritas Tionghoa banyak yang enggan masuk didalamnya. Bahkan dalam Pemilu ke Pemilu masyarakat Tionghoa cenderung masih tertutup. Namun, hal ini bukan menandakan adanya sikap a-politis masyarakat Tionghoa seperti pada masa Orde Baru. Bukti dari hadirnya partisipasi aktif masyarakat Tionghoa seperti terlihat dengan banyaknya tokoh Tionghoa yang memegang jabatan politik, di tengah mayoritas pemilih Melayu. Di Kabupaten Bangka ada tokoh Tionghoa yang menjadi anggota Dewan misalnya Agung Setiawan, Riniarti Sajuni, Budiono, Junaidi Surya, dan Tjindriajana. Di Kabupaten Bangka Tengah ada Me Hoa yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah (2019-2024). Di Kabupaten Bangka Barat ada Bong Ming Ming yang menjadi Wakil Bupati Bangka Barat.

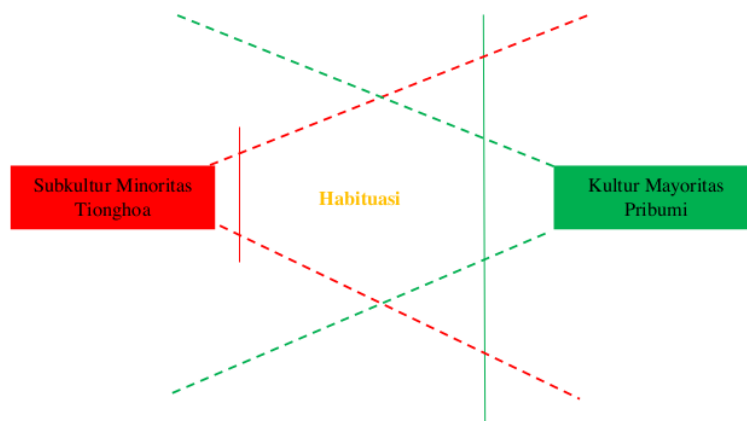
Meskipun mayoritas Etnis Melayu yang maju dalam Pemilu, namun tingkat keterpilihan etnis Tionghoa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan Melayu itu sendiri. Biasanya mereka memanfaatkan ikatan kekerabatan misalnya dalam pemilihan kepala daerah, Pemilu anggota dewan, Pemilihan Kepala Desa dan sebagainya. Sejak presiden Abdurrahman Wahid itulah, banyak Etnis Tionghoa yang mulai terjun aktif dalam bidang politik. Masyarakat Tionghoa banyak yang aktif mencalonkan diri sebagai calon terpilih pada setiap Pemilu. Menariknya, banyak orang Melayu yang menjadi Tim Sukses calon yang berasal dari Tionghoa, bahkan ada politisi Tionghoa; Rudianto Tjen, yang terpilih berkali-kali sebagai Anggota DPR RI. Candaan beberapa politisi Melayu bahkan menyebut bahwa Rudianto Tjen ini anggota DPR RI abadi dari Kepulauan Bangka Belitung (Wawancara Johan Murod, 25 November 2021). Kekhawatiran akan kebangkitan terma pribumi dan non-pribumi sebagai wacana baru yang dibangkitkan oleh para kandidat sebagaimana ditemukan dalam studi Chen (2022) sepertinya tidak terjadi dalam konteks elektoral di Pulau Bangka. Faktanya bahwa klaim kembali istilah pribumi dalam proses elektoral adalah hal yang bersifat 'oknum', bukan substansial sebagai perkara kesetaraan antar etnis. Biasanya tentu ada, tapi sepanjang ia dimainkan sebagai gerakan ketakutan dalam kompetisi yang tidak mendapatkan ruang optimal pada pemilih, justru menunjukkan bahwa identitas, apapun bentuk dan objeknya, tetap menjadi warna dari kontestasi demokrasi dimana ciri prosedural masih menjadi indikatornya.

Etnis Melayu dan Tionghoa yang ada di Pulau Bangka sepertinya menyadari bahwa interaksi yang ada merupakan hasil yang terpahat secara simultan. Adanya kontestasi yang *soft* antara Tionghoa dan Melayu tercipta karena secara historis mereka terikat satu sama lain. Perasaan senasib sepenanggungan khususnya, ketika terjadinya kolonialisasi di Bangka Belitung menyebabkan mereka memiliki ikatan batin. Selain itu, tradisi pernikahan yang

melebar menjadi terma pendukung untuk masuknya toleransi yang semakin kuat. Sentimen etnis akhirnya tidak nampak di permukaan, meskipun secara penguasaan modal sosial, politik dan ekonomi mayoritas dikuasai oleh Melayu. Kebijakan yang pro kesetaraan juga dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan rekrutmen pegawai, santunan sosial, pendidikan, kesempatan politik dan sebagainya. Secara kultur, perayaan sembahyang kubur atau Cheng Beng dilakukan meriah dan bahkan difasilitasi oleh Pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa potensi budaya yang ada melalui tradisi *Cheng Beng* dan juga Imlek, ikut mendorong perekonomian masyarakat ke arah yang lebih positif, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bangka.

Habitus dengan demikian terbentuk sebagai bagian dari proses penguasaan modal oleh Etnis Tionghoa sehingga mereka relatif bisa diterima dengan baik di tengah-tengah dominasi penduduk lokal yang umumnya adalah Melayu. Penguasaan modal ini menjadi modal dasar terbentuknya kekuatan Etnis Tionghoa untuk terlibat tidak sebatas pada lapangan sehari-hari, tapi juga di hampir semua sektor kehidupan.

Skema 1. Habituasi Subkultur Tionghoa



Merujuk pada Buourdieu (1990) empat modal yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa terbentuk dari empat pilar utama, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Pada modal ekonomi, jika di akar rumput Etnis Tionghoa cenderung merupakan figur pekerja dan membentuk harmonisasi antaretnis dengan inklusivitas ekonomi, di daerah perkotaan mereka memegang posisi sentral sebagai aktor utama perdagangan. Dengan modal ini, mereka tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat, namun juga relatif dianggap sebagai orang 'the have' yang telah mendorong akses mereka yang kuat pada sektor ekonomi. Penguasaan pada aspek ekonomi ini pada akhirnya dianggap sebagai konsekuensi dari pengelompokan tempat tinggal, suatu kondisi dimana masyarakat kebanyakan pribumi pun kondisinya nyaris demikian sehingga penguasaan ekonomi tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. Sementara itu pada aspek sosial, mereka cenderung diterima dan berbaur dengan semua strata oleh sebab mereka sendiri pun membentuk pengelompokan sosial dari sisi strata sosial sendiri. Di level elit, Etnis Tionghoa cenderung berbaur dan tidak membangun eksklusivitas sosial secara terbuka. Tidak heran jika elit Tionghoa banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan kemudian membentuk relasi yang kuat dengan prinsip kesamaan. Dari sisi budaya, perjalanan panjang sejarah penduduk lokal di Pulau Bangka tidak lepas dari keberadaan Etnis Tionghoa sehingga mereka pun memberikan pengaruh budaya yang kental pada masyarakat lokal. Berbagai tradisi budaya, kuliner, dan

dialek lokal pun tidak terhindarkan sangat berpengaruh pada budaya lokal. Adapun dari sisi simbol, Etnis Tionghoa yang dipersepsi sebagai warga yang kuat secara ekonomi, memiliki jejaring etnisitas yang kuat, dan sekarang cenderung dianggap memiliki legitimasi yang kuat dengan menguasai posisi-posisi politis tertentu.

Skema 1 di atas menunjukkan bahwa proses habituasi telah mendorong terbentuknya penerimaan atas subkultur minoritas Tionghoa bagi kalangan mayoritas. Merujuk pada Buordieu bahwa proses habituasi itu terbentuk dalam jangka lama dimana didalamnya struktur objektif dan fenomena subjektif menyatu membentuk kolektivitas realitas sosial. Dengan demikian tulisan ini ingin berjarak dengan studi Anggraeni (2011) yang mengatakan bahwa sekalipun ingin melupakan perbedaan, tetap saja Tionghoa membutuhkan paradigma berbeda dalam menampung identitas Tionghoa dalam konteks sosial. Studi ini merujuk pada habituasi yang sebetulnya dengan sendirinya telah mencoba membentuk paradigma penerimaan secara khusus, terlebih pada konteks di Pulau Bangka.

Habituasi subkultur Etnis Tionghoa ini dapat dikatakan ditandai dengan penguasaan pada 4 modal yang menempatkan Etnis Tionghoa sebagai subkultur yang berpengaruh. Jika melihat ulasan dalam bagian-bagian sebelumnya, habituasi ini terbentuk secara perlahan dan tidak merupakan sebuah proses perubahan secara dramatis sehingga terbentuk dengan transformatif. Kecenderungan dominasi subkultur minoritas di tengah dominasi ini menunjukkan bahwa pembentukan habituasi berlangsung dalam kurun waktu yang lama dengan dukungan kultur mayoritas yang cenderung terbuka. Pembagian kesamaan-kesamaan, baik pada modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik menunjukkan adanya pembagian peran yang relatif halus sehingga tidak menimbulkan resistensi yang kuat. Politik berbagi adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi pembentukan habituasi.

Pada level modal ekonomi, politik berbagi ditandai dengan aspek pengelompokkan Etnis Tionghoa yang tidak selalu merujuk pada dominasi di bidang ekonomi. Masyarakat kebanyakan yang menguasai sektor ekonomi di kawasan perkotaan pun menempuh penguasaan ekonomi yang hampir sama. Di modal sosial, berbagi solidaritas dan inklusivitas elit adalah indikator dari politik berbagi, yakni berbagi peran; berbagi peluang dan akses. Sementara pada sektor budaya, pembagian pengaruh justru berlangsung lebih lama dengan akulturasi yang harmonis sejak lama. Di sektor modal simbolik, telah banyak pertukaran yang terjadi, tidak hanya menyangkut soal kekuatan politik yang tetap terbagi, juga pada simbol-simbol lain, diantaranya adalah status sosial, otoritas dan legitimasi politik.

Politik berbagi peran adalah salah satu aspek penting dalam rangka memastikan bahwa peran masing-masing tidak saling menegasi. Bagi penulis, berbagi peran dengan model kompetisi yang tetap terjaga secara demokratis adalah jaminan agar konteks mayoritas dan minoritas tidak meluas menjadi konflik identitas. Sejauh politik berbagi ini bisa berjalan dengan elegan dan tidak berorientasi pada dilema antara tanah air, kewarganegaraan, dan tempat tinggal sebagaimana dikhawatirkan oleh Lan (2016), pengerasan identitas yang mengarah pada prasangka berbalut kebencian tidak akan terjadi.

5. Penutup

Keberadaan Etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka merupakan jalinan historis yang panjang. Praktik dalam kehidupan kemasyarakatan antara Tionghoa dan Melayu terjalin dengan baik dalam harmoni. Meskipun demikian, terdapat kontestasi yang saling mempengaruhi dan relasi yang terasa dominatif. Dalam praktiknya, Etnis Tionghoa mampu memainkan peran yang baik, khususnya dilihat dari perspektif modal yang disampaikan oleh Buordieu. Etnis Tionghoa mampu menguasai keseluruhan modal yang ada, dengan bukti hadirnya dominasi di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Adanya akomodasi politisi Tionghoa terpilih dalam jabatan publik merupakan salah satu bukti yang tidak terbantahkan. Dalam bidang sosial dan

budaya, banyak hadir tradisi Tionghoa yang mulai mampu diterima dengan baik oleh Melayu. Hadirnya sekolah bercorak Tionghoa di Bangka ikut mengaskan hadirnya kuasa dominatif itu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, praktis pelaku ekonomi di pusat kota Pangkalpinang, Muntok, Tanjungpandan, Sungailiat mayoritas dilakukan oleh Etnis Tionghoa. Semboyan *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong* dianggap sebagai mantra ampuh yang memberikan legitimasi kultural Etnis Tionghoa Bangka dari nihilnya praktik diskriminatif. Kolaborasi yang baik, menciptakan harmoni meskipun di dalamnya baik Tionghoa dan Melayu masing-masing tetap ada yang berpegang pada identitasnya yang saling bertaut, bahkan berhadapan.

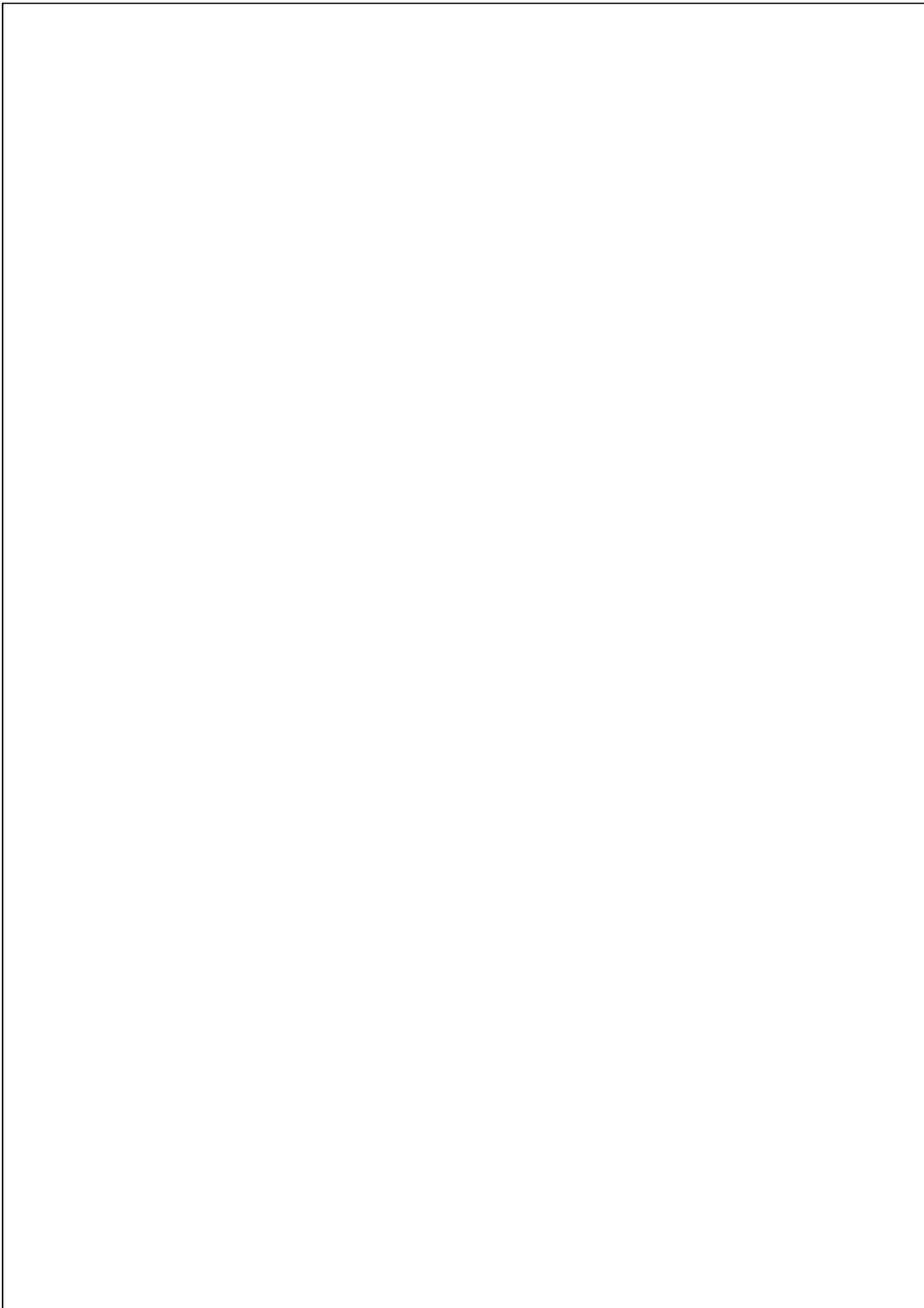
Studi ini menyimpulkan bahwa habituasi Etnis Tionghoa sebagai subkultur yang diterima secara luas oleh kultur mayoritas telah berjalan dengan penguasaan modal yang baik oleh Etnis Tionghoa. Habituasi ini didukung oleh politik berbagi peran yang dipraktikkan dalam waktu yang sangat lama dengan dinamika perubahan yang terjadi sebagai bagian dari realitas sosial. Habituasi yang berjalan dengan baik menjadi sebab mengapa sekalipun terasa sebagai dominasi subkultur, eksistensi Etnis Tionghoa tidak dihadapi dengan cara resisten sebagaimana terjadi di banyak daerah lain.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, D. (2011). Does Multicultural Indonesia Include its Tionghoa Ethnic? *Wacana*, 13(2), 256—278. <https://media.neliti.com/media/publications/181186-EN-does-multicultural-indonesia-include-its.pdf>
- Aryodiguno, H. (2018). Changes in Tionghoa-Indonesian Identity: Indonesianization or Re-Sinicization? *AEGIS*, 3(1), <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/728>
- Bakhri, A.S., Hanubun, Y.R. (2019). Pendekatan Kualitatif, Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi. Dalam *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Gawe Buku, Yogyakarta. 172-194. https://www.researchgate.net/profile/Ismail-Wekke/publication/344211215_Metode_Penelitian_Ekonomi_Syariah/links/5f5c12bc4585154dbbcb2f12/Metode-Penelitian-Ekonomi-Syariah.pdf
- Brahma, S. (2018). The Position of Ethnic Tionghoa in Indonesia. *IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature: IJRHAL*, 6(8), 269-276. <https://oaji.net/articles/2017/488-1535975182.pdf>
- Buordieu, P. (1990). *In Other Words: essay Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Chen, J. (2022). Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1), 59-87, <https://doi.org/10.1177/18681034211036716>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: SAGE
- Cribb, R., Coppel, C.A. (2009). A Genocide That Never was: Explaining The Myth of Anti-Tionghoa Massacres in Indonesia, 1965-66. *Journal of Genocide Research*, 11 (4), 447-465, <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/55932>
- Darwance, D., Nugroho, S., Yokotani, Y. (2017). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pengaturan Pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: dari Zaman VOC hingga Indonesia Merdeka. *Proceeding of Nation Seminar and Call for Paper of Economic and Bussiness (SNAPER-EBIS 2017)-Jember 27-28 Oktober 2017*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6716>
- Erman, E. (2007). *Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam Politik Lokal di Indonesia* dalam *Politik Lokal di Indonesia* Editor: Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken supported by Ireen Karang-Hoogenboom, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.

- <https://pure.know.nl/portal/en/publications/deregulasi-tata-niaga-timah-dan-pembuatan-negara-bayangan-lokal-s>
- Erman, E. (2008). Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island. *Southeast Asia: History and Culture*. Nomor 37-2008 https://www.researchgate.net/publication/265323185_Rethinking_Legal_and_Illegal_Economy_A_Case_Study_of_Tin_Mining_in_Bangka_Island
- Erman, E. (2009). *Dari Pembentukan Kampung Ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Ombak. http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2513
- Erman, E. (2010). "Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka Belitung (1920-1950)." *International Workshop article: Tionghoa Ethnic Position on the Democratization Process at Indonesia in 1930-1960s*, Padang, 19-21 July 2006. <https://media.neliti.com/media/publications/151013-ID-politik-protes-dan-etnisitas-kasus-buruh.pdf>, accessed on 9 April 2021.
- Fashri, F. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Buordieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Fernando, J., Sya, M., Marta, R. F. (2019). Amalgamation as a Strengthening Ethnic. 35(2), 334-341. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/4863/pdf>
- Giddens, A. (1997). *Central Problem in Social Theory*. Berkeley: University of Chicago Press.
- Given, L.M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Los Angeles: Sage. https://ia903402.us.archive.org/7/items/encyclopedia_202104/the%20sage%20encyclopedia%20of%20qualitative%20research%20methods.pdf
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3 (1): 116–134. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Han, S.T. (2017). Chinese correspondence in Dutch East Indies, 1865-1949. D., *Wacana* 18(2), 343-384, DOI: 10.17510/wacana.v18i2.588.
- Heidhues, M.F.S. (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper: Tionghoa Settlement on an Indonesian Island*. Singapore: Institute of South Asian Studies. <https://www.amazon.com/Bangka-Tin-Mentok-Pepper-Settlement/dp/9813035994>
- Heidhues, M.F.S. (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, I, Rendy, R., Sujadmi, S., Saputra, P.P., Febriani, L. (2020). Fan Ngin Tong Ngin Tjit Jong - The Assimilation Face of Grassroot of Tionghoa Ethnic in Bangka Island, Indonesia. *SHS Web of Conferences* 76(01013), 2-7. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/04/shsconf_icsh2020_01013.pdf
- Ibrahim, I., Pratama, S., Saputra, P.P., Rendy, R. (2019). The Politics of Indonesian Tionghoa at Grassroots Level (A Study of the Village Head of Indonesian Tionghoa in Bangka Islands). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 353, 284-289. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.49>
- Ibrahim. (2013). *Bisnis, kekuasaan, dan Identitas: Studi Terhadap perilaku Politik Etnis Tionghoa di Bangk Belitung Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: FISIPOL UGM
- Idi, A. (2012). *Harmoni Sosial: Interaksi Sosial "Natural-Asimilatif" antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka*. *Thaqaffiyat*, 13(2), 361–383
- Kavin, R. (2016). Politik Lokal di Bangka Belitung Antara Timah dan Etnis Tionghoa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 75–92. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/84>
- Karmela, S. H., Satrio, P. (2017). *Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-orang Tionghoa di Kota Jambi*. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v7i1.30>

- Lan, T.J. (2017). *Tionghoa Indonesia and China-Indonesia Relations: A Juxtaposition of Identity and Politics*. *Masyarakat Indonesia*, 43(2), 198-206. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/738/509>
- Marta, R. F. (2018). *Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth*. *Jurnal Bricolage*, 4(1), 23– 31. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/1649/1388>
- Miles, B.M., Huberman, M.A. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nugroho, Y.A. (2013). *Peranakan Tionghoa di Bangka-Belitung [Tionghoa Generation at Bangka-Belitung]* <https://historia.id/kultur/articles/peranakan-tionghoa-di-bangka-belitung-6keRv> accessed on 9/5/2021 11.36.
- Permana, N. A. (2002). *Berita Penelitian Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah*. *Antropologi Indonesia*, 68(1), 18–21. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i68.3439>
- Pageh, I. M. (2018). *Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali*. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 88–98. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411>
- Priyono, H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reid, A. (2009). *Escaping the Burdens of Chineseness*. In *Asian Ethnicity*. 10(3), 285-296, Routledge. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631360903189666>
- Ritaudin, M. S. (2017). *Teologi Politik Berbalut SARA antara Ambisi dan Konspirasi*. *Jurnal Kalam*, 11 (1), 85–105. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.1087>
- Setiati, D. (2008). *Makanan Tradisional Masyarakat Bangka Belitung*. S. Rohana, (Ed). Tanjung Pinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.
- Suharnomo. (2017). *Understanding Business Behavior of the Chinese Indonesian: a Study Using Hofstede's Cultural Framework*, *Jurnal Dinamika Manajemen*, 8 (1) 2017, 11-19, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/10407>
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago & London: The University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3637826.html>
- Sya, M, Marta, R.F., Sadono, T.P. (2019). *Tinjauan Historis Simbol Harmonisasi Antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung*. *Journal of Sejarah Citra Lekha*, 4(2), <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.23517>
- Theo, R., & Lie, F. (2014). *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Turner, S. (2003). *Setting The Scene Speaking Out: Tionghoa Indonesians After Suharto*. In *Asian Ethnicity*, 4(3), 337-352, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1343900032000117187>
- Turner, S., Allen, P. (2007). *Tionghoa Indonesians in a Rapidly Changing Nation: Pressures of Ethnicity and Identity*. In *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 112-127. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8373.2007.00334.x>
- Umar, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaenudin, M.N. (2016). *Representasi Tema Subkultur Indonesia dalam Karya Seniman Bandung Periode 2010-2015, Studi Kasus Karya Seni Ranadireksa, Henrycus Napit Sunargo, Mufti Priyanka, Panca Dwinandhika Zen, dan Radi Arwinda*. *E-Proceeding of Art & Design*, 3(2), 299-309. <https://core.ac.uk/download/pdf/299909904.pdf>
- Zein, A. B. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani



Artikel Society

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

3%

2

pt.scribd.com

Internet Source

1%

3

nanopdf.com

Internet Source

1%

4

repository.upi.edu

Internet Source

1%

5

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1%

6

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

7

docplayer.info

Internet Source

<1%

8

media.neliti.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words